

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA . Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 12 Februari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN**



**RUDIYANTO, S.Sos., MM
NIP. 19740513 199302 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran	66
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	71
BAB IV PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut SATUAN POLISI PAMONG PRAJA diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas: Membantu tugas Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b) penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;

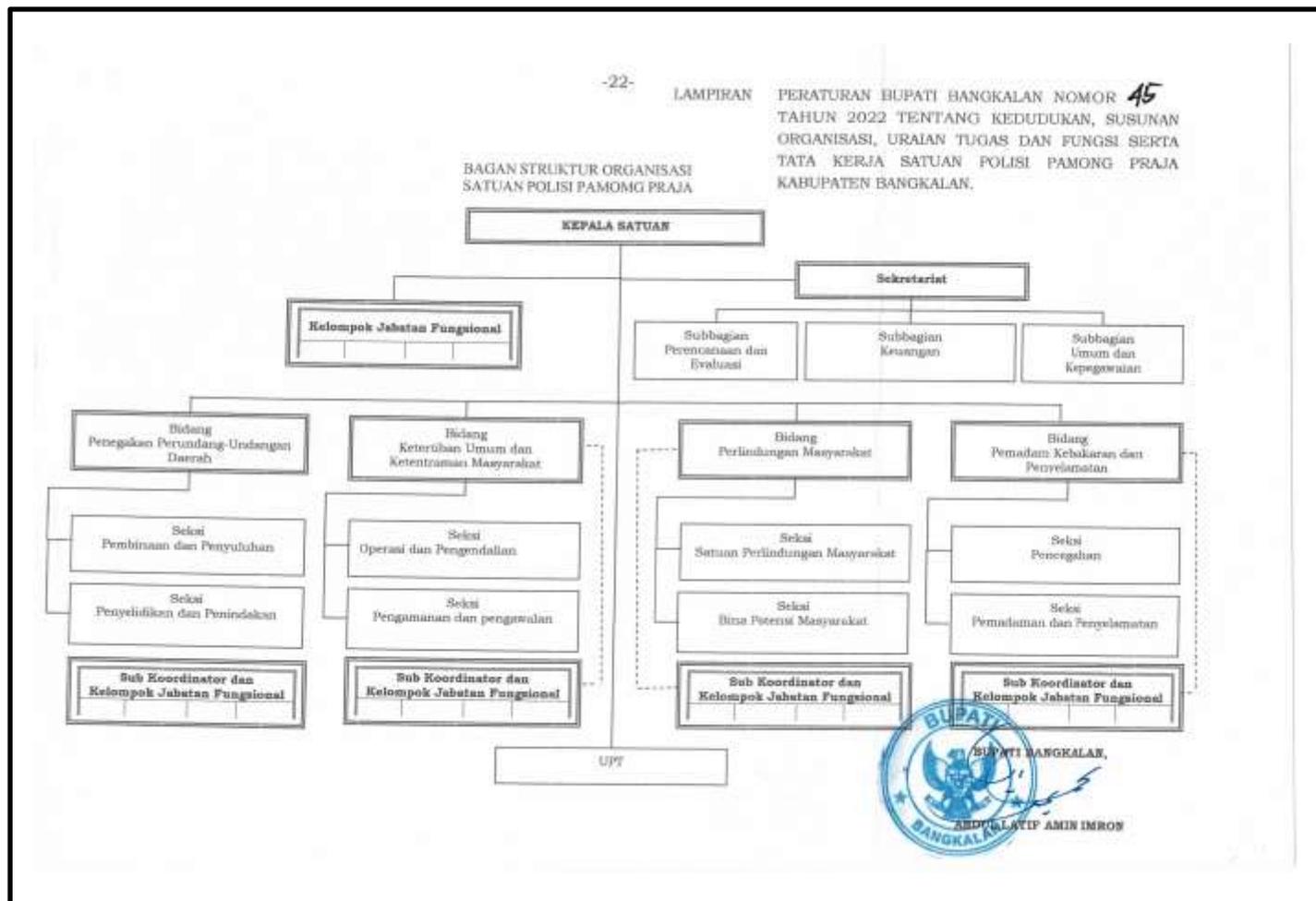
- c) pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d) pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Satuan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang.

Berikut bagan struktur organisasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Kesadaran Hukum masyarakat masih rendah, yang ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran hukum dan Peraturan Daerah;
2. Meningkatnya gangguan Trantibum akibat meningkatnya dinamika sosial sebagai dampak semakin mudahnya akses informasi dan kemajuan teknologi;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola tertib lingkungan seperti penyalahgunaan fungsi sungai, fungsi hutan mangrove, serta berbagai penambangan liar yang dapat berpotensi pada bencana alam;
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta fungsi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagai upaya pencegahan dini terhadap berbagai gangguan Keamanan dan Trantibum; dan
5. Maraknya pelanggaran ijin usaha yang berdampak pada penurunan tingkat pencapaian PAD. Faktor yang mempengaruhi adalah belum optimalnya sinergitas antar instansi terkait utamanya dalam proses sinkronisasi data dan informasi dilapangan serta pola tindak terhadap pelanggar berbagai produk perijinan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat dengan menurunnya pelanggaran PERDA/PERKADA melalui sosialisasi dengan Masyarakat dan melakukan pemantauan serta pengawasan melalui patroli rutin wilayah untuk memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat
2. Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan Trantibumlinmas, serta sinkronisasi data penyusunan dan penetapan rencana aksi penyelenggaraan trantibumlinmas melalui perjanjian kinerja
3. Meningkatnya sarana dan prasarana LINMAS dengan tersedianya beberapa pos ronda dan atribut seragam SATLINMAS untuk mengoptimalkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan Masyarakat di wilayah desa
4. Melakukan peningkatan kapasitas anggota SATLINMAS desa di beberapa kecamatan
5. Melakukan pengawasan terhadap ijin usaha untuk menekan adanya pelanggaran PERDA/PERKADA terkait perizinan dan pemantauan terkait pajak daerah sehingga meningkatkan capaian PAD
6. Meningkatnya penguatan aparatur damkar dengan keikutsertaan diklat secara bertahap

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan
7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022
8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 7 Seri A) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 2 Seri A)

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini SATUAN POLISI PAMONG PRAJA . Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA merupakan hasil kesepakatan bersama antara SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah .

Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 adalah:

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang
Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Berkualitas
2. Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi
3. Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas dan Tata Kelola Pemanfaatan Potensi Ekonomi Sosial dan Budaya Local Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah
4. Mewujudkan Rasa Aman dan Adil pada Masyarakat
5. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis pada Pemerataan Wilayah dan Mendorong Iklim Investasi

Perumusan tujuan dan sasaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA mengacu pada Misi ke-4, yaitu :

Mewujudkan Rasa Aman dan Adil pada Masyarakat

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2018-2023 sebanyak 2 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target SATUAN POLISI PAMONG PRAJA sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terpeliharanya stabilitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan kepada masyarakat	1.1	Terselenggaranya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	0	0	0	100	100	100

	sesuai peraturan dan perundang-undangan									
				persentase penyelenggaraan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah	0	0	0	100	100	100
				persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	0	0	0	100	100	100
		1.2	Terselenggaranya penanggulangan bencana	persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	0	0	0	100	100	100
				persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	0	0	0	100	100	100
2	Meningkatnya kinerja urusan bidang trantibum linmas dan kebencanaan	1.3	terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan	0	0	0	100	100	100

Sumber : Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Optimalnya penanganan bencana dan peningkatan status desa dalam pembangunan	1.1 cakupan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	prosentase	Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----- x 100 %	Bidam Pemadam Kebakaran

						Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	
2		2.1	persentase penyelenggaraan kebencanaan	prosentase	persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	jumlah aparatur yang ikut pelatihan -----x100% jumlah aparatur linmas	Bidang Linmas
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat	1.1	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat/perda yang terselesaikan	prosentase	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat/perda yang terselesaikan ----- x 100 % Jumlah seluruh pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat/perda	Bidang Trantibum dan Bidang Peruu

Sumber : Indikator Kinerja Utama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat	1.1	Terselenggaranya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	prosentase	100
				persentase penyelenggaraan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah	prosentase	100
				persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	prosentase	100

1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat	1.2	Terselenggaranya penanggulangan bencana	persentase penyelenggaraan kebencanaan	prosentase	100
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat			persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	prosentase	100
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat	1.3	terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan	prosentase	100

Sumber : Rencana Kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023 mengacu pada dokumen

Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 20 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	100
		persentase terselenggaranya penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah	100
		persentase terselenggaranya perlindungan masyarakat	100
2	Terselenggaranya penanggulangan bencana	persentase penyelenggaraan kebencanaan	100
		persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100
3	terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan	100

Sumber : Perjanjian Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah

ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	100
	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	100
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	98
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban	5

	dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2

	Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1
	KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DAN PERATURAN BUPATI/ WALI KOTA	Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup	100
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	31
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan	57

	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	
	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang ikut pelatihan	100
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah penyelenggaraan pengembangan Kapasitas dan karir PPNS	1
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100
	KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	100

	KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	14
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	34
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	13

	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	39
	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2
	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan	100
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	150
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100

	DAERAH KABUPATEN/ KOTA		
	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6
	KEGIATAN ADMINISTRASI	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100

	KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7
	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi	100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100

	PEMERINTAHAN DAERAH		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1
--	--	---	---

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,

sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja

Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terselenggara nya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	100	100	100	Sangat Tinggi	SATPOL PP
		persentase penyelenggaraan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	SATPOL PP
		persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	100	100	100	Sangat Tinggi	SATPOL PP
2	Terselenggara nya penanggulang an bencana	persentase penyelenggaraan kebencanaan	100	100	100	Sangat Tinggi	SATPOL PP
3		persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan	100	100	100	Sangat Tinggi	SATPOL PP

		penyelamatan non kebakaran					
4	terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan	100	100	100	Sangat Tinggi	SATPOL PP
Rata-Rata Pencapaian Indikator Kinerja					100%	Sangat Tinggi	SATPOL PP

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pencapaian indikator kinerja yaitu 100 % dengan predikat kinerja sesuai kategori “Sangat Tinggi” dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada sasaran terselenggaranya pelayanan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat pada tahun 2023 menunjukkan pencapaian:
 - a) 100% pengaduan yang ditangani (**sangat tinggi**)
 - b) 100% Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan (**sangat tinggi**)
 - c) 100% aparatur linmas yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM (**sangat tinggi**)
2. Pada sasaran terselenggaranya penanggulangan kebencanaan pada tahun 2023 menunjukkan pencapaian:
 - a) 100% aparatur linmas melaksanakan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota (**sangat tinggi**)
 - b) 100% layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dalam respon time (**sangat tinggi**)
3. Pada sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan menunjukkan pencapaian:
 - a) Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 100% (**sangat tinggi**)

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun 2023		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terselenggaranya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat		90%	99%	100%	100%	100%
		persentase penyelenggaraan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah		100%	100%	100%	100%	100%
		persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%
2	Terselenggaranya penanggulangan bencana	persentase penyelenggaraan kebencanaan		100%	100%	100%	100%	100%
		persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan		130%	107%	100%	100%	100%

		penyelamatan non kebakaran						
4	terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan		100%	100%	100%	100%	100%

Uraian penjelasan tabel:

1. Pada sasaran terselenggaranya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, diperoleh realisasi kinerja:
 - a) persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tahun 2022 sebesar 99% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 100% untuk jumlah pengaduan dan pelanggaran yang ditangani
 - b) persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat menunjukkan capaian kinerja 100% pada tahun 2022 sama bila dibandingkan dengan tahun 2023
2. Pada sasaran terselenggaranya penanggulangan kebencanaan, dengan indicator: persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran menunjukkan capaian kinerja 100% pada tahun 2023 karena selalu melayani Masyarakat dengan maksimal
3. Pada sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan kesekretariat menunjukkan capaian indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan sebesar 100% sama dengan tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terselenggaranya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	100%	100%	100%
		persentase penyelenggaraan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah	100%	100%	100%
		persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	100%	100%	100%
2	Terselenggaranya penanggulangan bencana	persentase penyelenggaraan kebencanaan	100%	100%	100%
		persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	100%	100%
3	terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan	100%	100%	100%

		kesekretariatan			
--	--	-----------------	--	--	--

Uraian penjelasan tabel:

Sebagaimana pada tabel 3.4, maka rata-rata tingkat kemajuan pencapaian indikator sasaran pada tahun 2023 terhadap sasaran akhir Perubahan Renstra (2023) adalah 100%. Tingkat kemajuan pencapaian pada masing-masing sasaran atau indikator sasaran yaitu 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terselenggaranya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	100%	97%	10%
		persentase penyelenggaraan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah	100%	97%	103%
		persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	100%	97%	103%

2	Terselenggaranya penanggulangan bencana	persentase penyelenggaraan kebencanaan	100%	100%	100%
		persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	100%	100%
3	terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terselenggaranya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	1.Meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat dengan menurunnya pelanggaran PERDA/PERK ADA melalui sosialisasi dengan Masyarakat namun, Masih adanya masyarakat yang kurang kooperatif pasca dilaksanakan penertiban oleh SATPOL PP	1.Melakukan himbauan dan edukasi kepada masyarakat secara rutin 2. Melakukan patroli secara berkala 3. Dilakukan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di seluruh desa kabupaten bangkalan secara berkala
		persentase penyelenggaraan penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah	100%	100%	100%	2.Aparatur Satpol PP yang loyal terhadap Institusi Pemerintah Bangkalan namun, Kurangnya dukungan anggaran karena anggaran di Satpol pp lebih berfokus pada anggaran khusus yaitu DBHCHT sehingga untuk kegiatan fungsi Satpol pp sangat	
		persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	100%	100%	100%		

						<p>minim</p> <p>3. melakukan pemantauan serta pengawasan melalui patroli rutin wilayah untuk memberikan himbauan dan edukasi kepada Masyarakat</p> <p>4. Meningkatnya sarana dan prasarana LINMAS dengan tersedianya beberapa pos ronda dan atribut seragam SATLINMAS untuk mengoptimalkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan Masyarakat di wilayah desa namun, Hanya beberapa desa yang mengikuti peningkatan kapasitas anggota anggota Satlinmas Desa</p>	
2	Terselenggaranya penanggulangan bencana	persentase penyelenggaraan kebencanaan	100%	100%	100%	Tugas dan fungsi untuk bencana alam lebih fokus pada BPBD	

		persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	100%	100%	1. Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran 2. Kurangnya aparatur damkar yang bersertifikasi diklat pemadam kebakaran	Dukungan penambahan saran dan prasana pemadam kebakaran
3	terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	100%	1. Kurangnya dukungan anggaran karena alokasi untuk pemeliharaan minim 2. sarana dan prasarana sebagian kurang layak 3. bangunan gedung dan lahan parkir kurang dengan melihat jumlah aparatur satpol pp sekitar 318 orang dan kendaraan	Dukungan anggaran untuk fungsi pelayanan Satpol PP

Uraian penjelasan tabel:

- 1) Capaian indicator kinerja persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat sebesar 100%.
- 2) Capaian indicator persentase penyelenggaraan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah sebesar 100%.
- 3) Capaian indicator persentase penyelenggaraan perlindungan Masyarakat sebesar 100%.

- 4) Capaian Indikator persentase penyelenggaraan kebencanaan sebesar 100%.
- 5) Capaian indikator persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebesar 100%.
- 6) Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan sebesar 100%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Terselenggaranya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	100%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	100	MENUNJANG
				KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	100	
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui	100	

				Pelaksanaan Patroli	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100	
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	100	
		persentase penyelengg	100%	Pemberdayaan Perlindungan	Jumlah Dokumen	100	

		araan perlindungan masyarakat		Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100	
				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan	100	

					Dimutakhirkan		
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100	
		persentaase penyelenggaraan penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah	100%	KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DAN PERATURAN BUPATI/ WALI KOTA	Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup	100	
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/	100	
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	100	

					Bupati/Wali Kota		
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	100	
				PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang ikut pelatihan	100	
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan karir PPNS	100	
2	Terselenggaranya penanggulangan bencana	persentase penyelenggaraan kebencanaan	100%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100	MENUNJANG
				KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAA N TERHADAP BENCANA	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat	Jumlah Personil TRC yang Dikembang	100	

				(TRC) Bencana Kabupaten/Kota	kan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		
		persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	100	MENUNJANG
				KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	100	
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	100	

					Setiap Tahunnya		
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	100	
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	100	
				Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar	100	

					Teknis Terkait		
				Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampil an Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggula ngan Kebakaran	100	
				INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100	
				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Li ngkungan yang Dipersyarat kan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	100	
				PENYELENGGA RAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAK AN MANUSIA	Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolonga n yang diadakan	100	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatk an	100	

				Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		
3	terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	MENUNJANG
				KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	
				Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	
				Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	
				Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100	

					Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	
				KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	100	

					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	
				ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir	100	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	
				KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi	100	
				Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	100	

				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	100	

					dan Konsultasi SKPD		
				KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	100	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	
				KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	100	

				Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100	
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100	
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	100	
				KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	100	
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang	100	

				Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100	
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	100	

				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberday aan Perlindung an Masyarakat dalam rangka Ketenteram an dan Ketertiban Umum	100	
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindung an Masyarakat yang Ditingkatka n Kapasitasa nya	100	
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100	
				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteram an Masyarakat yang Telah	100	

					Dibuat dan Dimutakhirkan		
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100	
				KEGIATAN PENEKAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DAN PERATURAN BUPATI/ WALI KOTA	Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup	100	
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/	100	
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	100	

					Bupati/Wali Kota		
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	100	
				PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang ikut pelatihan	100	
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan karir PPNS	100	
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100	
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	100	

					Kapasitasanya		
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100	
				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100	
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat	100	

					/Pelaku Usaha/		
				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100	
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	100	
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan	100	

					Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada		
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	
				Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	100	

				Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	100	

					Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	12.72	

				Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100	

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata - rata sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria sangat tinggi.

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.310.460.966	2.197.425.100	95%
	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA	98.995.500	94.698.500	96%

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	19.750.000	18.935.500	96%
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2.431.000	2.431.000	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	27.400.000	27.400.000	100%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000	24.977.500	100%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	4.000.000	3.950.000	99%
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.444.500	12.534.500	81%
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	500.000	-	0%
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	4.470.000	4.470.000	100%
KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DAN PERATURAN BUPATI/ WALI KOTA	2.207.465.466	2.099.262.000	95%
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.707.062.200	1.657.511.800	97%
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.804.850	2.592.050	92%
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	497.598.416	439.158.150	88%

	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	4.000.000	3.464.600	87%
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	4.000.000	3.464.600	87%
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.845.150	4.845.150	100%
	KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	4.845.150	4.845.150	100%
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	4.845.150	4.845.150	100%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	227.810.000	219.672.027	96%
	KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	126.610.000	119.408.777	94%
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	57.997.600	57.996.777	100%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.250.000	40.950.000	87%
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	10.500.000	10.500.000	100%
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri	7.482.400	6.582.000	88%
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	3.380.000	3.380.000	100%
	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	1.200.000	1.200.000	100%
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.200.000	1.200.000	100%

	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	100.000.000	99.063.250	99%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100.000.000	99.063.250	99%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.864.398.489	11.732.673.162	99%
	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.203.000	24.297.500	96%
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.649.700	5.995.000	90%
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	12.520.350	12.459.500	100%
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	181.550	-	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.801.400	1.793.000	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.050.000	4.050.000	100%
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.186.901.270	6.073.729.295	98%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.176.624.770	6.063.452.795	98%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.441.850	4.441.850	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.834.650	5.834.650	100%
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.611.350	1.611.350	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.611.350	1.611.350	100%

	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	83.324.801	77.843.716	93%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.531.900	2.530.800	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.730.200	22.439.500	95%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000	9.000.000	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.578.701	2.578.500	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	0%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.958.000	2.814.000	95%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.526.000	38.480.916	90%
	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.380.954.518	5.373.419.718	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.462.950	1.462.950	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.844.068	52.104.418	97%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.325.647.500	5.319.852.350	100%
	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	186.403.550	181.771.583	98%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.603.550	169.985.583	97%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	1.450.000	1.450.000	100%
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.470.000	4.470.000	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.880.000	5.866.000	100%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	100	100	100	69.995.500	65.771.000	94%	6%
	persentase penyelenggaraan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah	100	100	100	2.211.465.466	2.102.726.600	95%	5%
	persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	100	100	100	29.000.000	28.927.500	100%	0%
	persentase penyelenggaraan kebencanaan	100	100	100	4.845.150	4.845.150	100%	0%
	persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100	100	100	227.810.000	219.672.027	96%	4%
	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan	100	100	100	11.864.398.489	11.732.673.162	99%	1%

Uraian penjelasan tabel:

- 1) Capaian Indikator Kinerja persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 94% sehingga Tingkat efisiensinya sebesar 6%.
- 2) Capaian Indikator Kinerja persentase penyelenggaraan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah dengan capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 95% sehingga Tingkat efisiensinya sebesar 5%.
- 3) Capaian Indikator Kinerja persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 100% sehingga Tingkat efisiensinya sebesar 0%.
- 4) Capaian Indikator Kinerja persentase penyelenggaraan kebencanaan dengan capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 100% sehingga Tingkat efisiensinya sebesar 0%.
- 5) Capaian Indikator Kinerja persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 96% sehingga Tingkat efisiensinya sebesar 4%.
- 6) Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan dengan capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 100% sehingga Tingkat efisiensinya sebesar 0%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA menetapkan sebanyak 1 tujuan, 3 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran Terselenggaranya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)

- Sasaran Terselenggaranya penanggulangan bencana terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 14.407.514.605 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.154.615.439 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 98% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 2%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Bangkalan, 12 Februari 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN



RUDIYANTO, S.Sos., MM
NIP. 19740513 199302 1 001